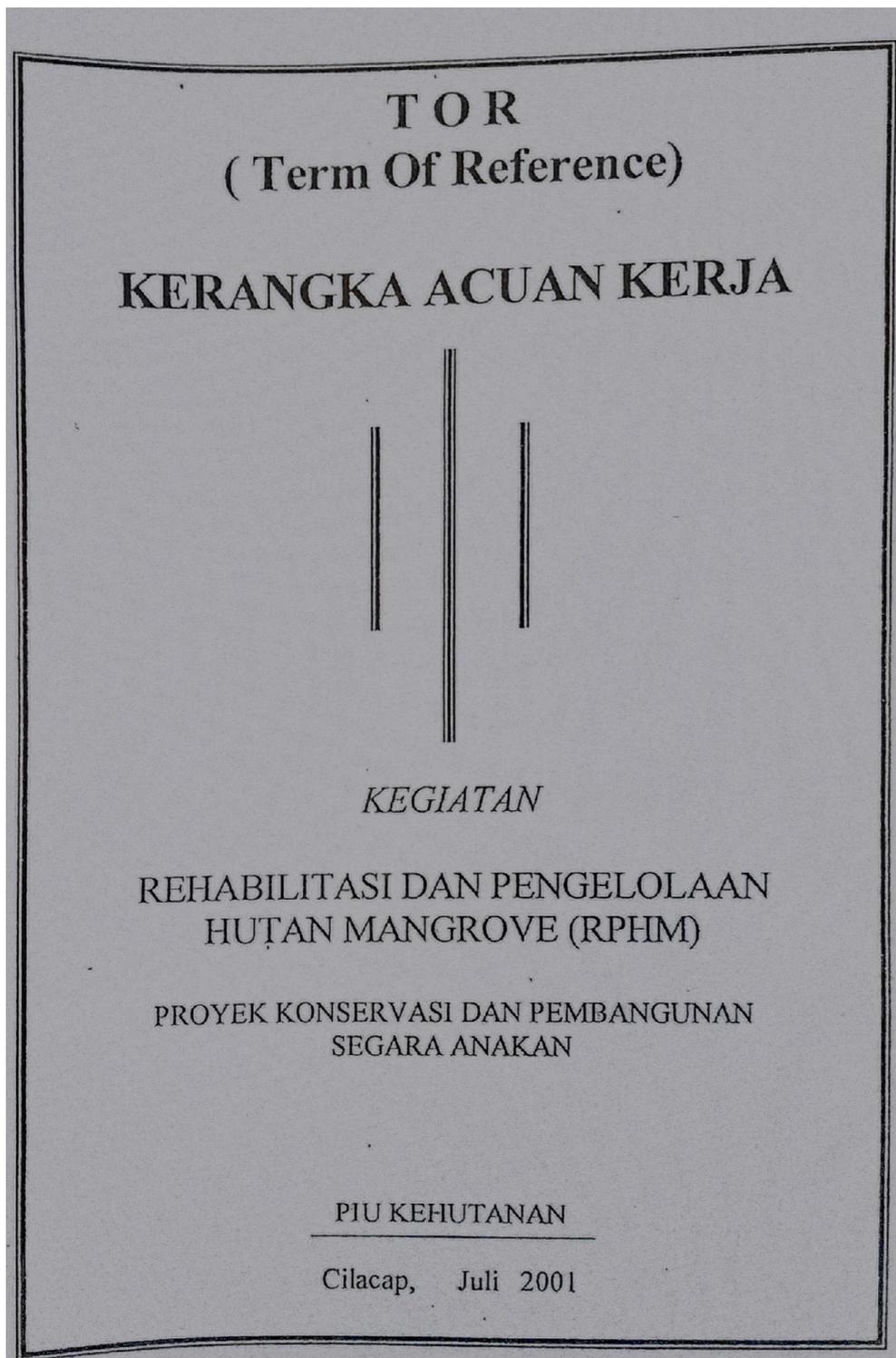


Lampiran Surat Perjanjian Syarat Khusus Hak Cipta Non Eksklusif :



Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Rehabilitasi dan Pengolahan Hutan Mangrove (RPHM) tentang Proyek Konservasi dan Pembangunan Segara Anakan (Daftar informasi Khazanah Arsip Konservasi dan Pembangunan Kawasan Segara Anakan Cilacap-Jawa Tengah Tahun 1995-2000, Nomor II.2.3.2.1)



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CILACAP
DENGAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIAMIS**

NOMOR : 050 / 00123 / 15.4
181 / 1 - Huk / 1997

TENTANG :

PEMBENTUKAN ORGANISASI JOINT DISTRICT TASK FORCE (JDTF) SEGARA ANAKAN
CONSERVATION AND DEVELOPMENT PROJECT (SACDP) ATAU PROYEK KONSERVASI
DAN PEMBANGUNAN SEGARA ANAKAN.

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga bulan
Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (3-1-1997), kami
yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MOHAMAD SUPARDI** : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cilacap, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Cilacap selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **DEDEM RUCHLIA** : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ciamis, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Ciamis selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1988 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (P5D) ;
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS tanggal 5 Mei 1995 Nomor : 183/KMK/03/1995
Kep/031/Ket/5/1995
tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penata Usahaan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan APBN ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan APBD ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum dilingkungan Departemen Dalam Negeri ;

Kesepakatan Bersama Bupati Cilacap dan Ciamis ttg Pembentukan JDTF SACDP (Daftar informasi Khazanah Arsip Konservasi dan Pembangunan Kawasan Segara Anakan Cilacap-Jawa Tengah Tahun 1995-2000, Nomor I.1.2.4.1)

48-2

Appendix 3



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DENGAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

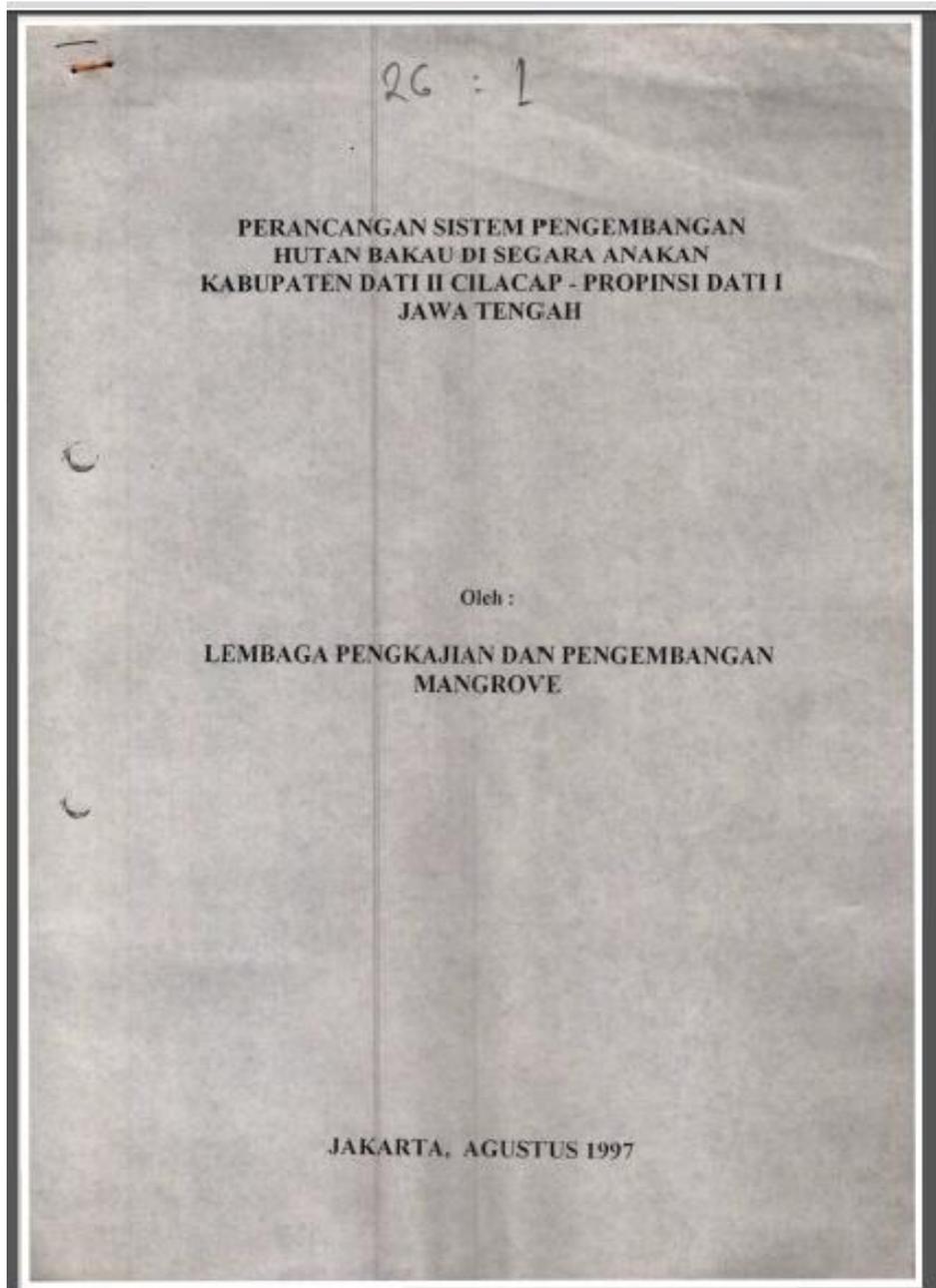
NOMOR : 050.05 / 5383 / 97
912.05/02 - BAPP/07

TENTANG

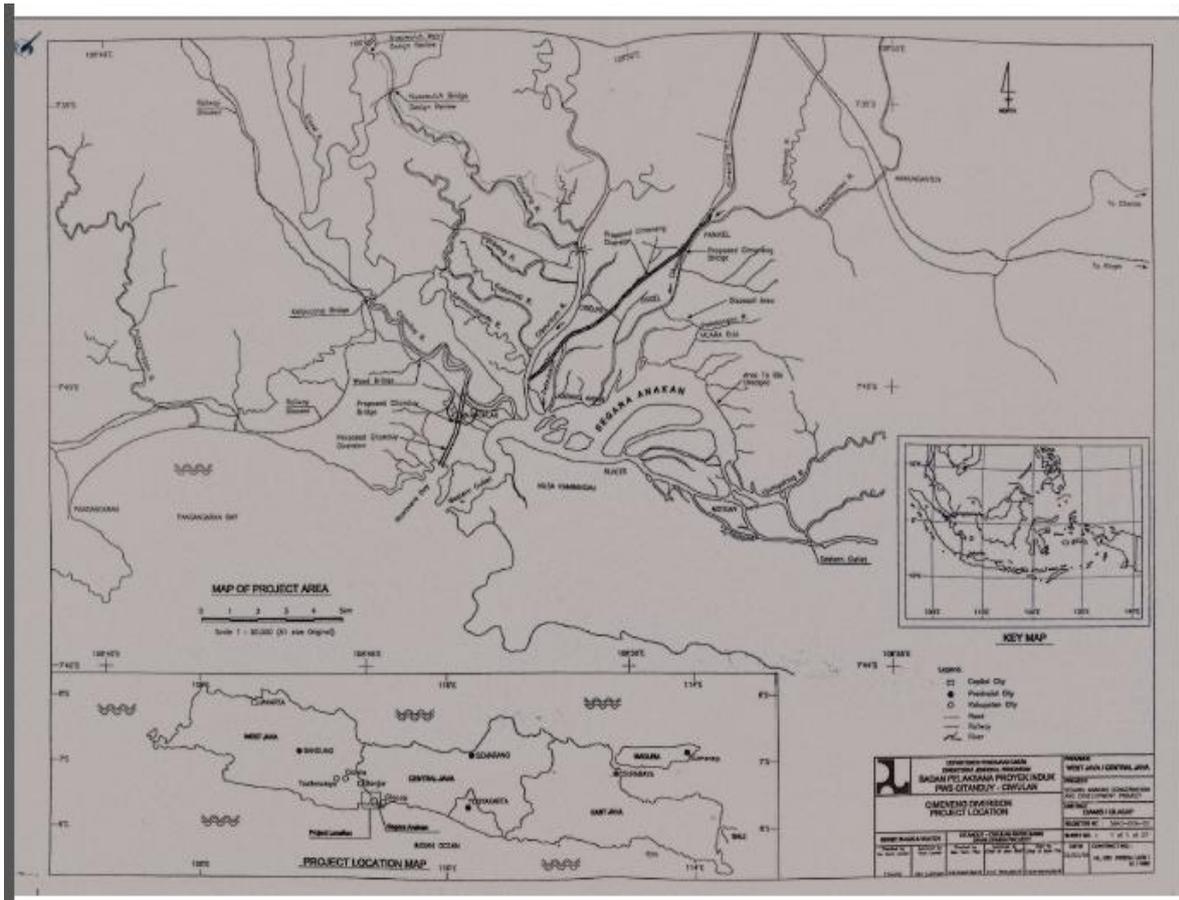
PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH PADA
PROYEK KONSERVASI DAN PEMBANGUNAN SEGARA ANAKAN

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
~~PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT~~

Kesepakatan Bersama Gubernur Jateng dan Jabar ttg Pembentukan Panitia Pengarah pada Proyek Konservasi dan Pembangunan Segara Anakan (Daftar informasi Khazanah Arsip Konservasi dan Pembangunan Kawasan Segara Anakan Cilacap-Jawa Tengah Tahun 1995-2000, Nomor I.2.1.5.2)



Perancangan Sistem Pengembangan Hutan Bakau di Segara Anakan Cilacap (Daftar informasi Khazanah Arsip Konservasi dan Pembangunan Kawasan Segara Anakan Cilacap-Jawa Tengah Tahun 1995-2000, Nomor II.1.1.7.5)



Peta Segara Anakan (Daftar informasi Khazanah Arsip Konservasi dan Pembangunan Kawasan Segara Anakan Cilacap-Jawa Tengah Tahun 1995-2000, Nomor II.2.4.8.1)